

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan pendapatan per kapita masyarakat dalam suatu negara yang berlangsung dalam jangka panjang. Pembangunan diartikan sebagai peningkatan produk nasional (GDP, GNP) yang disebabkan bukan saja oleh peningkatan kuantitas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi melainkan digunakannya sistem dan teknologi baru (Hudiyanto, 2001).

Menurut Sadono Sukirno (1994) pembangunan adalah suatu hal yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan suatu negara, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Pembangunan dilakukan dalam berbagai sektor kehidupan dan melibatkan kegiatan produksi. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang.

Pembangunan ekonomi ditujukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat disisi ekonomi maupun sisi sosial. Salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi itu sendiri yaitu menciptakan kesempatan dan lapangan kerja semaksimal mungkin supaya angkatan kerja yang berada didalam suatu negara tersebut dapat terserap dalam proses kegiatan ekonomi di negara tersebut. Dilain sisi tujuan dari pembangunan ekonomi ialah terciptanya pertumbuhan serta peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, yang dimana dalam pengelompokan negara berdasarkan taraf kesejahteraan masyarakatnya, dimana salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara – negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial, dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2007).

Terjadinya pengangguran disuatu negara dapat dikarenakan jumlah lapangan pekerjaan disuatu wilayah tertentu tidak dapat mencukupi jumlah angkatan kerja atau jumlah permintaan akan lapangan pekerjaan akan penawaran lapangan kerja tidak seimbang. Hal tersebut berakibat bertambahnya jumlah pertumbuhan tenaga kerja melebihi jumlah kesempatan kerja.

Dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius dari pada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan rendah. Keadaan di negara-negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini menunjukkan bahwa pembangunan yang telah tercipta tidak sanggup mengadakan kesempatan kerja yang lebih cepat dari pada penambahan penduduk yang berlaku. Oleh karenanya, masalah pengangguran yang mereka hadapi dari tahun ke tahun semakin lama semakin bertambah serius. Lebih prihatin lagi dibeberapa negara miskin bukan

saja jumlah pengangguran menjadi bertambah besar, tetapi juga proporsi mereka dari keseluruhan tenaga kerja semakin bertambah tinggi (Sukirno, 1985:65).

Pengangguran diartikan sebagai seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Sukirno, 2008). Banyaknya pengangguran disuatu wilayah merupakan masalah yang tidak hanya mencakup bidang perekonomian saja. Disisi lain, masalah pengangguran juga mempunyai hubungan erat dengan bidang sosial dan pendidikan. Di zaman seperti sekarang bukan hanya masyarakat yang memiliki pendidikan rendah saja yang menganggur, masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi pula juga banyak yang menganggur.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu tingkatan produk perkapita pada suatu negara yang berlangsung secara terus – menerus dari tahun ke tahun dalam kurun waktu yang panjang. Jika laju pertumbuhan ekonomi disuatu negara meningkat maka produksi barang dan jasa akan meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut, yang menyebabkan meningkatnya standar hidup masyarakat. Laju ekonomi yang tinggi disuatu negara akan meningkatkan kesempatan kerja sehingga akan menurunkan tingkat pengangguran. Namun sebaliknya apabila laju ekonomi tersebut menurun maka akan berdampak terhadap sedikitnya kesempatan kerja untuk masyarakat dan meningkatnya jumlah pengangguran di negara tersebut.

Pertumbuhan ekonomi disuatu negara merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di suatu negara. Apabila di suatu negara mempunyai pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dari tahun ke tahun maka dapat diartikan negara tersebut memiliki kemajuan di bidang pembangunan dan sebaliknya. Naik turunnya pertumbuhan ekonomi akan menentukan keberhasilan pembangunan di suatu negara. Naiknya pertumbuhan ekonomi disuatu negara akan menambah jumlah investasi sehingga pembangunan di setiap daerah suatu negara akan terlaksana. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan menambah pendapatan per kapita yang mengakibatkan konsumsi rumah tangga bertambah.

Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat pengangguran di suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah maka akan semakin tinggi pula kesempatan berkembang bagi perusahaan dan penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat daerah tertentu. Disamping itu pertumbuhan ekonomi melalui PDRB yang meningkat, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di wilayah tersebut, karena dengan kenaikan PDRB kemungkinan dapat meningkatkan kapasitas produksi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penurunan PDRB suatu daerah dapat dikaitkan dengan tingginya jumlah pengangguran pada daerah tersebut. Angka pengangguran yang rendah dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang baik.

Indonesia mempunyai jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia, hal itu merupakan kelebihan Indonesia dalam hal penyediaan tenaga kerja dan pengembangan sumber daya manusia. Namun disisi lain hal itu akan mempunyai dampak yaitu tersedianya angkatan kerja yang besar. Pertumbuhan angkatan kerja

yang pesat yang tidak diikuti dengan pertumbuhan lapangan kerja serta penawaran tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau klasifikasi yang dituntut oleh pasar tenaga kerja akan menimbulkan masalah pengangguran pada suatu negara. Tingkat pengangguran yang besar mencerminkan lambatnya atau kurang berhasilnya pembangunan suatu negara.

Kaum klasik berpendapat bahwa penduduk yang semakin banyak jumlahnya berakibat penurunan pada pendapatan nasional, dan hal tersebut akan berdampak secara tidak langsung pada tingkat pengangguran. Kenaikan jumlah penduduk pada suatu negara akan menyebabkan lonjakan angkatan kerja. Dengan sempitnya jumlah lapangan kerja yang tersedia di suatu negara, para angkatan kerja tidak akan terserap sepenuhnya.

Jumlah tingkat pengangguran serta angkatan kerja menunjukkan besarnya jumlah penduduk yang harus diikuti sertakan dalam proses pembangunan yang berarti bahwa tingkat pengangguran dan angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk yang mampu menggerakkan proses ekonomi. Ini menggambarkan bahwa dinamika proses pembangunan harus mampu melibatkan seluruh angkatan kerja maka jumlah angkatan kerja yang besar itu dapat menjadi beban bagi pembangunan ekonomi.

Dimasa sekarang, pendidikan diposisikan sebagai sarana untuk peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang ada dan mencerminkan tingkat kepandaian atau pencapaian pendidikan formal dari penduduk karena semakin tingginya tamatan pendidikan seseorang maka semakin

tinggi pula kemampuan kerja atau produktivitas seseorang dalam bekerja. Tujuan akhir program pendidikan adalah teraihnya lapangan kerja yang diharapkan.

Dalam UUD 1945 pasal 28C yang telah diamandemen disebutkan bahwa : “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” . Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan bahwa besarnya porsi anggaran pendidikan adalah 20 persen dari total APBN. Ini mengimplikasikan bahwa komitmen bangsa ini untuk menempatkan pendidikan sebagai salah satu komponen sumber daya pengetahuan, sehingga dipahami bahwa pengetahuan akan menjadi pembangkit kemajuan ekonomi. (BPS,2012)

Dimata penduduk berkembang, pendidikan dipandang sebagai sarana guna meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang ada. Atau dalam bahasa lain, tujuan akhir dari program pendidikan adalah teraihnya lapangan kerja yang diharapkan. Setidaknya masyarakat yang telah mengenyam pendidikan setelah selesai mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih berkelas di sektor formal. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pekerjaan yang mereka dapatkan kelak. Semakin lama jangka waktu yang masyarakatkan habiskan untuk mendapatkan pendidikan semakin tinggi atau bermartabat pula pekerjaan yang mereka dapatkan dan semakin terhindar mereka dari masalah pengangguran.

Pendidikan mencerminkan tingkat kepandaian atau pencapaian pendidikan formal dari penduduk karena semakin tingginya tamatan pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan kerja atau produktivitas seseorang dalam bekerja. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui tamatan pendidikan diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran, dengan asumsi tersedianya lapangan pekerjaan formal. Pada umumnya untuk bekerja di bidang perkotaan atau pekerjaan yang bergengsi membutuhkan orang-orang atau tenaga kerja berkualitas, profesional dan sehat agar mampu melaksanakan tugas-tugas secara efektif dan efisien.

Menurut pendapat Keynes dalam Sadono Sukirno (2008) bahwa peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Akan tetapi fluktuasi kegiatan ekonomi yang lebar dari satu periode ke periode lainnya dan ini akan menimbulkan implikasi yang serius kepada kesempatan kerja dan pengangguran dan tingkat harga.

Keynes juga berpendapat bahwa dalam sistem pasar bebas penggunaan tenaga kerja penuh tidak selalu tercipta sehingga perlu dilakukan usaha dan kebijakan pemerintah untuk menciptakan penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang teguh (Sukirno, 2008). Salah bentuk campur tangan

yang dapat dilakukan adalah dengan menjalankan kebijakan fiskal. Dalam hal ini Keynes mengisyaratkan kebijakan fiskal yang ekspansif melalui pengurangan pajak dan penambahan pengeluaran pemerintah (Government Expenditure).

Tabel 1.1

Penduduk Yang Termasuk Angkatan Kerja, Bekerja, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi di Pulau Jawa, 2011-2012 (ribuan)

Provinsi	Angkatan Kerja		Bekerja		TPT (%)	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
DKI Jakarta	5144	5369	4588	4839	10,8	9,87
Jawa Barat	19357	20150	17455	18321	9,83	9,08
Jawa Tengah	16919	17091	15916	16130	5,93	5,63
DIY	1873	1945	1799	1868	3,97	3,97
Jawa Timur	19762	19891	18940	19072	4,16	4,12
Banten	5210	5125	4530	4606	13,06	10,13
Nasional	117370	118039	109670	110795	6,56	6,14

Sumber; Berita Resmi Statistik (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui secara umum jumlah penganggur pada tahun 2012 di semua provinsi di Pulau Jawa kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta menurun jika dibandingkan dengan tahun 2011. Penurunan tertinggi terjadi pada Provinsi Banten yaitu 23,79

Dari enam provinsi yang terletak di Pulau Jawa, jumlah angkatan kerja terbanyak pada tahun 2012 yaitu Provinsi Jawa Barat (20.150 orang) diikuti Provinsi Jawa Tengah (17.091 orang). Jika dibandingkan dengan tahun 2011,

selain Provinsi Banten semua provinsi bertambah jumlah angkatan kerja pada tahun 2012. Dari total angkatan kerja, jumlah yang bekerja paling banyak adalah Provinsi Jawa Timur dan terendah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada tahun 2012, Provinsi dengan TPT terendah di Pulau Jawa adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (3,97%) dan yang tertinggi adalah Provinsi Banten (10,13%). Dilihat dari perkembangan TPT dari tahun 2011 dan 2012, tampak bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur, nilai TPT yang dimiliki ketiga provinsi tersebut selalu lebih rendah dari angka Nasional, sedangkan provinsi lainnya selalu jauh lebih tinggi.

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman. Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas satu kota dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan. Menurut sensus penduduk 2012, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki jumlah penduduk 3.514.764 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka 3,97%. Angkatan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012 sebesar 1.944.858 penduduk atau 55,33% dari total jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 1.2

**Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pendidikan
di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Tahun	LPE (%)	Pendidikan (indeks)
2007	3,40	80,01
2008	3,95	80,34
2009	7,15	80,80
2010	3,68	81,58
2011	4,33	82,19
2012	4,43	82,51

Sumber; BPS(data diolah)

Dari tahun 2007 hingga akhir 2012 terjadi peningkatan indeks pendidikan yang signifikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peningkatan indeks pendidikan tersebut mempunyai arti bahwa penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun mempunyai Rata-rata Lama Sekolah yang tiap tahun semakin bertambah serta berkurangnya Tingkat Buta Huruf Berbeda penduduk di daerah tersebut. Berbeda dari indeks pendidikan, Laju Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun yaitu 3,95% pada tahun 2008, meningkat menjadi 7,15% pada tahun 2009, menurun lagi menjadi 3,68 pada tahun 2010 dan meningkat kembali menjadi 4,33%. Laju Pertumbuhan Ekonomi tertinggi DIY selama periode 2007-2012 terjadi pada tahun 2009, dimana presentase Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 7,15%. Dan mengalami presentase terendah sebesar 3,4% pada tahun 2007.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja paling besar adalah sektor pertanian kemudian disusul sektor jasa-jasa lainnya. Sektor yang potensial dikembangkan yaitu sektor pariwisata, sektor perdagangan dan industri terutama industri kecil menengah serta kerajinan. Pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi problematika sosial yang cukup serius karena karakter pengangguran di daerah tersebut menyangkut sebagian tenaga-tenaga profesional dengan tingkat pendidikan tinggi.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah pada mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran di Kabupaten dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan data tahun 2007-2012.

C. Rumusan Masalah

Di seluruh negara – negara khususnya negara berkembang, masalah pengangguran masih menjadi suatu hambatan dalam perekonomian. Pemerintah telah mengupayakan serta memberikan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Besarnya angka pengangguran dipengaruhi oleh berbagai hal antara lain laju pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, pendidikan dan pengeluaran pemerintah. Maka dari itu diperlukan analisis mengenai tingkat pengangguran dan faktor – faktor yang mempengaruhi di Kabupaten dan Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah laju pertumbuhan ekonomi (LPE) berpengaruh terhadap jumlah pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah jumlah angkatan kerja berpengaruh terhadap jumlah pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap jumlah pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap jumlah pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh laju pertumbuhan ekonomi (LPE) terhadap jumlah pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk menguji pengaruh jumlah angkatan kerja terhadap jumlah pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk menguji pengaruh pendidikan terhadap jumlah pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Untuk menguji pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap jumlah pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, maka diharapkan hasil yang dapat diambil manfaatnya sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait Provinsi D.I Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi atau masukan terhadap pemerintah dan lembaga provinsi D.I Yogyakarta serta

bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk mengatasi pengangguran di Yogyakarta

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan tentang cara penulisan karya ilmiah yang baik, menerapkan teori-teori yang telah didapatkan di bangku kuliah yang digunakan sebagai bekal ketika nanti terjun ke masyarakat.

3. Bagi Akademisi

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan dan sumber referensi bagi pembaca dan memberikan informasi tentang tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam mengadakan penelitian dengan judul sejenis.

4. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan tentang keadaan tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta.